

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik	19
1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana.....	19
2. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu dalam Suatu Akta Autentik.....	20
B. Pidana Bersyarat	23
1. Pengertian Pidana Bersyarat	23
2. Pidana Bersyarat dengan Syarat Umum dan Syarat Khusus	25
3. Paramater Penjatuhan Pidana Bersyarat	26
C. Perseroan Terbatas	28
1. Perseroan Terbatas Sebagai Entitas Terpisah (<i>Separate Entity</i>)	28
2. Direksi.....	30
3. Rapat Umum Pemegang Saham	36

D. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris	38
1. Penyebab Batalnya Suatu Akta Notaris dengan Tidak Terpenuhinya Unsur-Unsur Syarat Sah Perjanjian Pasal 1320 KUHPer	38
2. Nilai Autentisitas Akta Notaris Sebagai Akta Autentik	40
3. Penerapan Asas Praduga Sah atau <i>Presumptio Iustae Causa</i> dalam Akta Notaris	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis dan Sifat Penelitian	43
B. Data Penelitian	45
C. Cara Pengumpulan Data	48
D. Analisis Data	49
E. Jalannya Penelitian	50
F. Hambatan Penelitian	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Implikasi Hukum Putusan Pidana Bersyarat Terhadap Kedudukan Terpidana Selaku Direktur ditinjau menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas	52
1. Posisi Kasus	52
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 697 K/PID/2025 <i>juncto</i> Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 434/PID/2024/PT BDG <i>juncto</i> Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 143/PID.B/2024/PN KWG	76
a. Upaya Pemulihan Hubungan Antara Korban dan Terpidana Sebagai Tujuan dan Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat	76
b. Perbuatan Terpidana telah Memenuhi Unsur-Unsur dalam Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	90
3. Implikasi Hukum Putusan Pidana Bersyarat Terhadap Kedudukan Terpidana Selaku Direktur ditinjau menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas	100
a. Pelanggaran <i>Fiduciary Duty</i> dan <i>Duty of Care and Skill</i> Terhadap Tugas dan Tanggung Jawab Terpidana selaku Direktur Perseroan	100

b. Status dan Kedudukan Seorang Direktur yang dijatuhkan Pidana Bersyarat dalam Perspektif Undang-Undang Perseroan Terbatas	110
B. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung 697 K/PID/2025 Terhadap Kedudukan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas.....	118
1. Ketidakbenaran Unsur Materiil dalam Akta PKR Nomor 05 Tanggal 04 September 2013 sebagai Penyebab Tidak Terpenuhinya Syarat Sah Objektif Perjanjian.....	118
2. Nilai Autentisitas Akta PKR Nomor 05 Tanggal 04 September 2013 yang Memuat Keterangan Palsu	130
3. Kedudukan Akta PKR Nomor 05 Tanggal 04 September 2013 yang Memuat Perjanjian Batal Demi Hukum.....	137
BAB V PENUTUP.....	144
A. Kesimpulan	144
B. Saran.....	146
DAFTAR PUSTAKA.....	148